

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Darda *et al* (2021) pembangunan diartikan sebagai upaya keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena bersifat berkelanjutan, proses pembangunan membutuhkan waktu dan tidak dapat dicapai secara instan. Pembangunan harus direncanakan secara sistematis dan terarah, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, serta mempertimbangkan dinamika sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Setiap tahap pembangunan saling berkaitan sehingga kegagalan dalam satu sektor dapat berdampak pada sektor lainnya. Oleh sebab itu, pembangunan mencakup pemerataan hasil pembangunan, peningkatan kualitas hidup, penguatan kapasitas masyarakat, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Pada dasarnya, arah utama dari proses pembangunan adalah menciptakan kondisi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat hanya dapat dicapai apabila pertumbuhan ekonomi berjalan dengan baik dan pendapatan didistribusikan secara adil. Apabila laju pertumbuhan ekonomi berlangsung pesat tetapi tidak disertai dengan pemerataan hasilnya, maka kondisi tersebut dapat memicu terjadinya ketimpangan antarwilayah (Nurhuda *et al.*, 2011).

Ketimpangan wilayah (*regional disparity*) muncul ketika proses pembangunan ekonomi tidak berlangsung secara merata di seluruh daerah. Kondisi ini tampak dari adanya kawasan yang berkembang pesat berdampingan dengan daerah lain yang masih tertinggal (Angelia, 2010). Dalam konteks ini, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menjadi

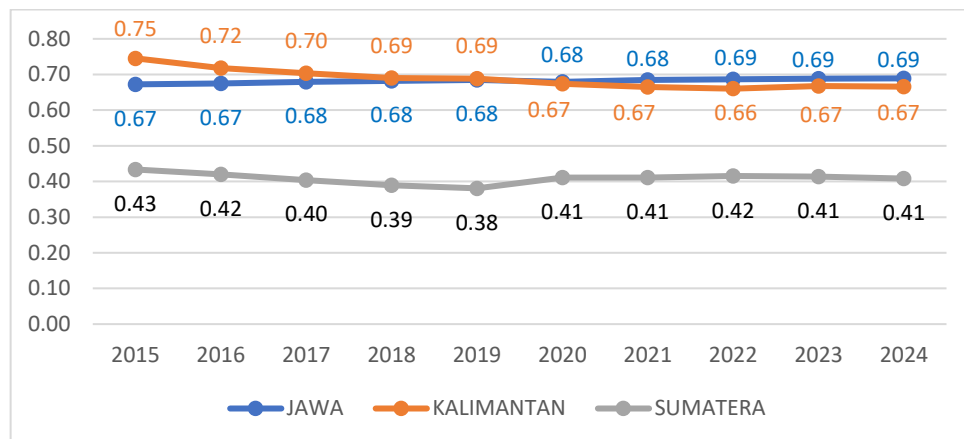
mekanisme utama dalam penyusunan rencana pembangunan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Melalui SPPN, proses perencanaan dilakukan secara sistematis dan terpadu dengan melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka panjang (RPJP), menengah (RPJM), dan tahunan (RKP). Dengan adanya sistem ini, pembangunan dapat diarahkan tidak hanya untuk mendorong pertumbuhan, tetapi juga untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata.

Pemerataan pembangunan telah diupayakan oleh pemerintah melalui Otonomi Daerah (otoda) dengan memperhatikan kapasitas pembangunan masing-masing daerah. Proses pelaksanaan pembangunan masih dibutuhkan fokus yang lebih intensif terutama pada wilayah yang tertinggal, wilayah yang padat penduduk, wilayah yang sangat jarang penduduknya, wilayah transmigrasi, wilayah terpencil dan wilayah perbatasan, serta wilayah yang memiliki karakteristik unik (P. Firdaus, 2020). Meskipun pemerataan sudah diupayakan oleh pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat namun belum semua daerah menerima manfaat yang sama, karena mekanisme alokasi sumber daya dan investasi sering kali terkonsentrasi di wilayah yang sudah maju (Wibowo & Pangestuty, 2023). Hal tersebut mencerminkan adanya ketidakseimbangan pembangunan, yang menyebabkan proses pembangunan berjalan tidak merata dan memperdalam ketidakseimbangan perbedaan antarwilayah.

Menurut Bakri, Syafrizal (2015) ketidakseimbangan pembangunan ekonomi antar wilayah adalah sebuah isu yang masih menjadi masalah dalam

segi pembangunan ekonomi, hal tersebut dapat terjadi apabila dinamika pembangunan diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar, di mana interaksi bebas antara permintaan dan penawaran cenderung mengarahkan investasi ke daerah yang sudah maju dan menguntungkan. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengurangi ketimpangan tersebut yaitu melalui pembangunan ekonomi (Syaifudin *et al.*, 2022). Pembangunan ekonomi pada dasarnya adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat baik dalam hal sosial ataupun ekonomi. Agar pembangunan dapat berlangsung secara terarah, terukur, dan tidak hanya terpusat pada wilayah tertentu, maka diperlukan suatu perencanaan pembangunan yang komprehensif dan inklusif. Perencanaan ini berfungsi sebagai pedoman dalam mengalokasikan sumber daya, menentukan prioritas pembangunan, serta memastikan bahwa daerah tertinggal memperoleh dukungan yang memadai dan mengurangi ketidakmerataan pembangunan.

Ketimpangan dalam pembangunan masih merupakan persoalan yang terus dihadapi oleh berbagai negara, baik dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, antar pulau, hingga skala global (M. Firdaus, 2013). Fenomena ketimpangan pembangunan wilayah di Indonesia masih menjadi isu strategis, meskipun berbagai kebijakan pembangunan telah diarahkan pada pemerataan. Pulau Jawa merupakan Kawasan Barat Indonesia (KBI) yang masih menghadapi ketimpangan pembangunan wilayah yang cukup tinggi. Berikut merupakan tingkat ketimpangan pembangunan wilayah di Kawasan Barat Indonesia (KBI) yang dihitung menggunakan indeks wiliamson.

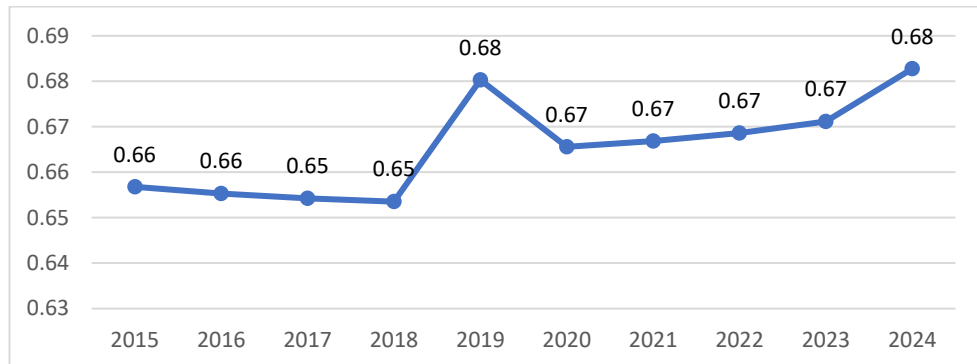


Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah 2026

Gambar 1. 1 Indeks Wiliamson 3 pulau di Kawasan Barat Indonesia (KBI) Tahun 2015-2024 (indeks)

Gambar 1.1 tersebut menunjukkan indeks wiliamson dari ketiga pulau yang terdapat di Kawasan Barat Indonesia (KBI) meliputi Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Kalimantan. Berdasarkan gambar tersebut, terlihat adanya perbedaan tingkat capaian pembangunan antarpulau yang cukup mencolok. Pulau Kalimantan memiliki nilai indeks williamson tertinggi pada awal periode, yaitu sekitar 0.74 pada tahun 2015 yang menunjukkan ketimpangan pembangunan relatif tinggi. Namun, nilainya cenderung menurun secara bertahap setiap tahun hingga mencapai sekitar 0.66 pada tahun 2024. Sebaliknya, Pulau Jawa menunjukkan tren yang relatif terus meningkat. Nilai indeks williamson Pulau Jawa berada pada kisaran 0.67 pada tahun 2015 dan terus mengalami kenaikan secara perlahan hingga mencapai sekitar 0.68 pada tahun 2024. Sementara itu, Pulau Sumatera memiliki tingkat ketimpangan pembangunan yang paling rendah dibandingkan kedua pulau di Kawasan Barat Indonesia (KBI). Nilai indeks williamson Pulau Sumatera menurun dari sekitar 0.43 pada tahun 2015 menjadi 0.40 pada tahun 2024. Berdasarkan nilai indeks williamson ketiga pulau di Kawasan Barat Indonesia (KBI) tersebut Pulau Jawa menjadi daerah yang menarik untuk diteliti dikarenakan trend

ketimpangan yang terus meningkat setiap tahunnya. Berikut merupakan rata-rata indeks wiliamson 6 provinsi di Pulau Jawa.



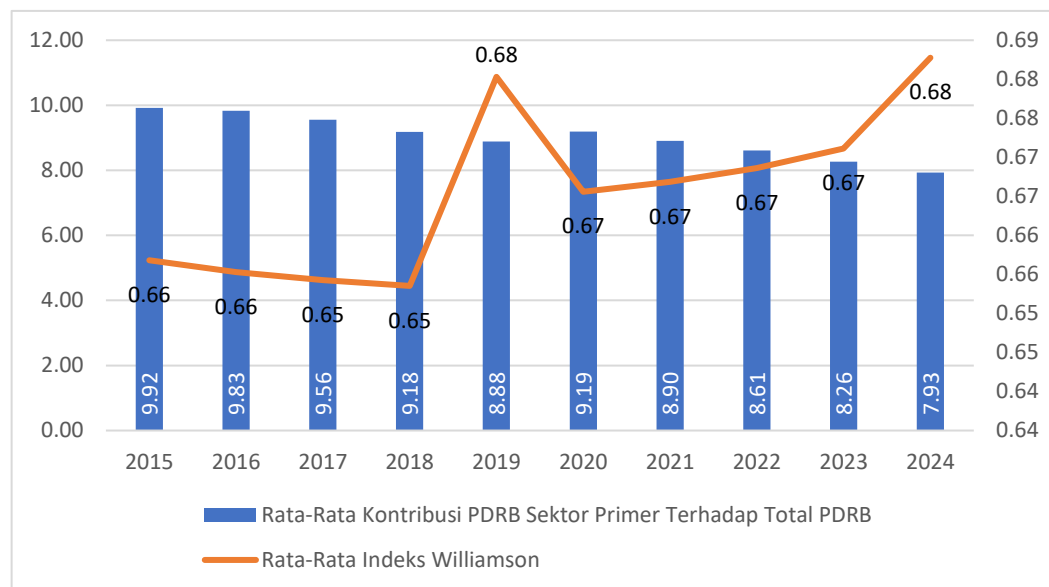
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah 2026

Gambar 1. 2 Rata-rata Indeks Wiliamson 6 provinsi di Pulau Jawa Tahun 2015-2024 (indeks)

Berdasarkan gambar 1.2 tersebut tingkat ketimpangan pembangunan wilayah di Pulau Jawa yang diukur menggunakan Indeks Williamson selama periode 2015–2024 menunjukkan pola yang fluktuatif. Pada periode awal 2015–2018, nilai Indeks Williamson cenderung menurun yaitu pada kisaran 0,66–0,65. Namun, pada tahun 2019 terjadi peningkatan ketimpangan yang cukup signifikan dengan nilai indeks mencapai sekitar 0,68. Selanjutnya, pada periode 2020–2023, tingkat ketimpangan cenderung stagnan pada level yang relatif tinggi, meskipun perekonomian mengalami tekanan akibat pandemi. Pada tahun 2023-2024, Indeks Williamson menunjukkan trend yang meningkat yaitu dari 0,67 menjadi 0,68.

Identifikasi penyebab ketimpangan pembangunan wilayah menjadi hal yang penting diidentifikasi untuk menyusun kebijakan pembangunan yang tepat dan efektif, mengingat ketimpangan tersebut dapat memicu berbagai dampak buruk bagi daerah (Mbura & Ginting, 2025). Menurut Sjafrizal (2008) terdapat beberapa faktor yang memengaruhi ketimpangan pembangunan wilayah yaitu perbedaan kandungan sumber daya alam serta perbedaan

kondisi demografi. Perbedaan kandungan sumber daya alam tercermin dari variasi potensi sektor primer seperti pertambangan, pertanian, kehutanan, dan perikanan yang tidak terdistribusi secara merata antar daerah. Perbedaan kandungan sumber daya alam antarwilayah menyebabkan terjadinya perbedaan kemampuan ekonomi regional, di mana wilayah dengan sumber daya alam yang melimpah cenderung tumbuh lebih cepat dan menarik lebih banyak investasi, sehingga berpotensi memperlebar ketimpangan pembangunan wilayah (Sjafrizal, 2008). Dengan demikian, penyajian data kandungan sumber daya alam menjadi penting untuk memahami sumber ketimpangan pembangunan wilayah. Berikut gambaran kandungan sumber daya alam di Pulau Jawa tahun 2015-2024.



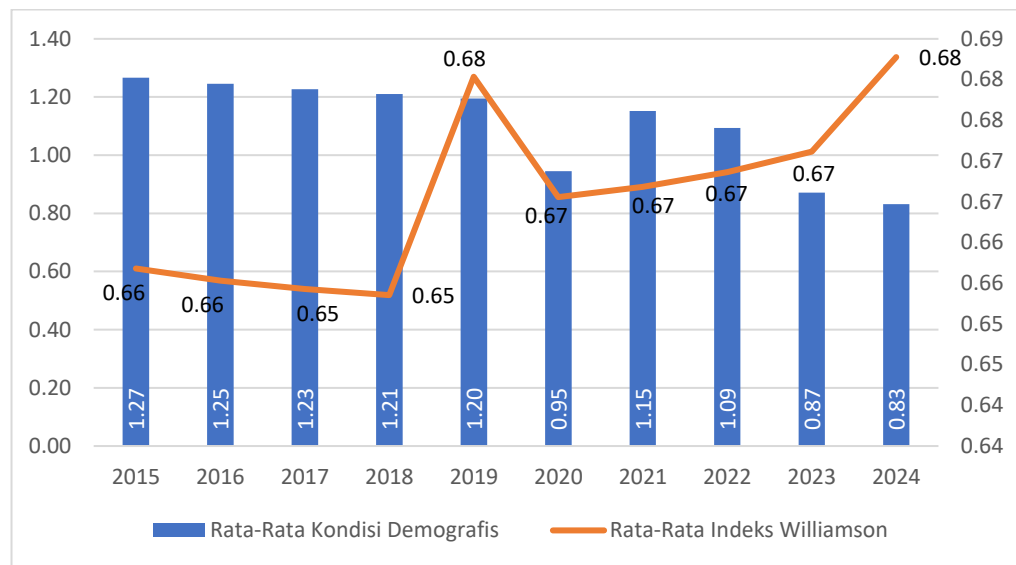
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah 2026

Gambar 1. 3 Rata-rata Kontribusi PDRB Sektor Primer terhadap Total PDRB dan Indeks Williamson 6 provinsi di Pulau Jawa Tahun 2015-2024 (persen)

Berdasarkan gambar 1.3 menunjukkan kontribusi sektor berbasis sumber daya alam di Pulau Jawa menunjukkan rata-rata kandungan sumber daya alam 6 provinsi di Pulau Jawa yang diprosikan melalui rata-rata kontribusi PDRB sektor

primer terhadap total PDRB menunjukkan trend yang cenderung menurun selama periode 2020-2024, yaitu dari 9,19% menjadi 7,93%. Di sisi lain, rata-rata indeks williamson justru mengalami peningkatan dari 0,67 menjadi 0,68. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara kondisi empiris dengan konsep dari Sjafrizal (2008), yang menyatakan bahwa wilayah dengan kekayaan sumber daya alam yang lebih besar cenderung memiliki tingkat pembangunan ekonomi yang lebih tinggi sehingga berpotensi memengaruhi ketimpangan antarwilayah. Namun, pada Pulau Jawa, penurunan kontribusi sektor berbasis sumber daya alam tidak diikuti oleh penurunan tingkat ketimpangan wilayah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa hubungan antara kekayaan sumber daya alam dan ketimpangan pembangunan wilayah masih memerlukan pengujian lebih lanjut. Oleh karena itu, variabel kandungan sumber daya alam dipilih dalam penelitian ini untuk menganalisis pengaruhnya terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Pulau Jawa.

Sementara itu, faktor kedua yang dapat memengaruhi ketimpangan pembangunan wilayah yaitu perbedaan kondisi demografis yang dapat diamati melalui laju pertumbuhan penduduk. Wilayah dengan jumlah penduduk besar dan komposisi usia produktif yang dominan memiliki potensi tenaga kerja yang lebih besar untuk mendukung aktivitas ekonomi. Namun demikian, apabila pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan ketersediaan lapangan kerja, maka kondisi tersebut justru dapat memperlebar ketimpangan pembangunan (Puspita *et al.*, 2025). Berikut merupakan data yang memperlihatkan rata-rata laju pertumbuhan penduduk di Pulau Jawa selama periode 2015-2024.



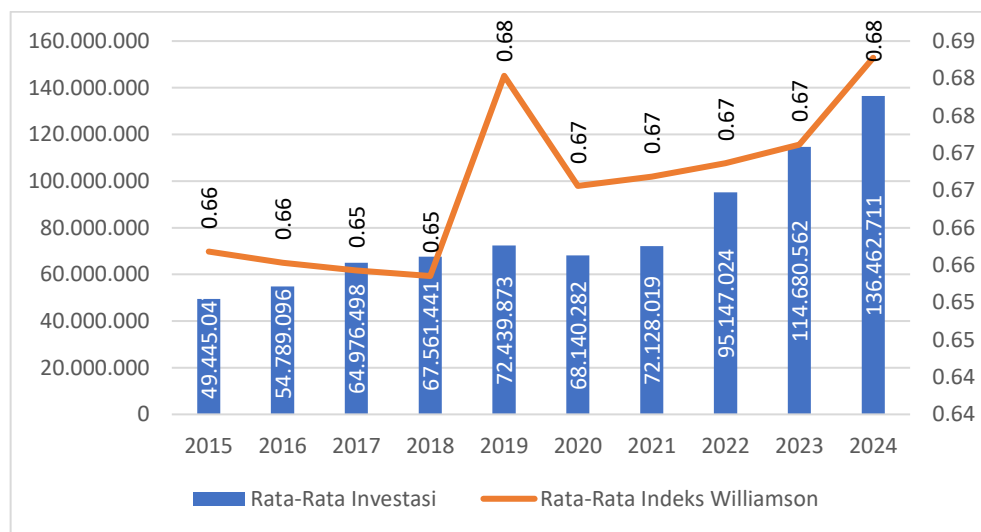
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah 2026

Gambar 1. 4 Rata-rata Kondisi Demografis dan Indeks Williamson 6 provinsi di Pulau Jawa Tahun 2015-2024 (persen)

Berdasarkan gambar 1.4 tersebut, rata-rata kondisi demografis yang diprosikan melalui laju pertumbuhan penduduk di Pulau Jawa menunjukkan kecenderungan menurun selama periode 2015-2024, yaitu dari 1,27% pada tahun 2015 menjadi 0,83% pada tahun 2024. Untuk nilai rata-rata indeks williamson justru menunjukkan kecenderungan meningkat dari 0,66 menjadi 0,68. Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa penurunan laju pertumbuhan penduduk belum diikuti oleh penurunan tingkat ketimpangan pembangunan wilayah di Pulau Jawa. Kondisi ini berbeda dengan pandangan yang menyatakan bahwa perubahan kondisi demografis dapat memengaruhi distribusi tenaga kerja, aktivitas ekonomi, dan pemerataan pembangunan antarwilayah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui apakah kondisi demografis berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Pulau Jawa.

Selain Kandungan Sumber Daya Alam dan Kondisi demografis, dalam proses pembangunan wilayah ketersediaan modal menjadi kebutuhan yang cukup penting sekaligus menjadi salah satu faktor utama. Investasi yang merupakan

modal dan sumber pembiayaan pembangunan daerah dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi setempat (Azim *et al.*, 2022). Penanaman modal melalui investasi memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa. Semakin besar investasi yang dialokasikan untuk proses produksi, semakin besar pula kemampuan wilayah dalam menyerap tenaga kerja, sehingga berpotensi mendorong pemerataan pendapatan per kapita. Namun demikian, distribusi investasi yang tidak merata antarwilayah dapat menimbulkan perbedaan pendapatan, yang pada akhirnya memperbesar ketimpangan pembangunan (Nurfifah *et al.*, 2022). Berikut rata-rata investasi 6 provinsi di Pulau Jawa.



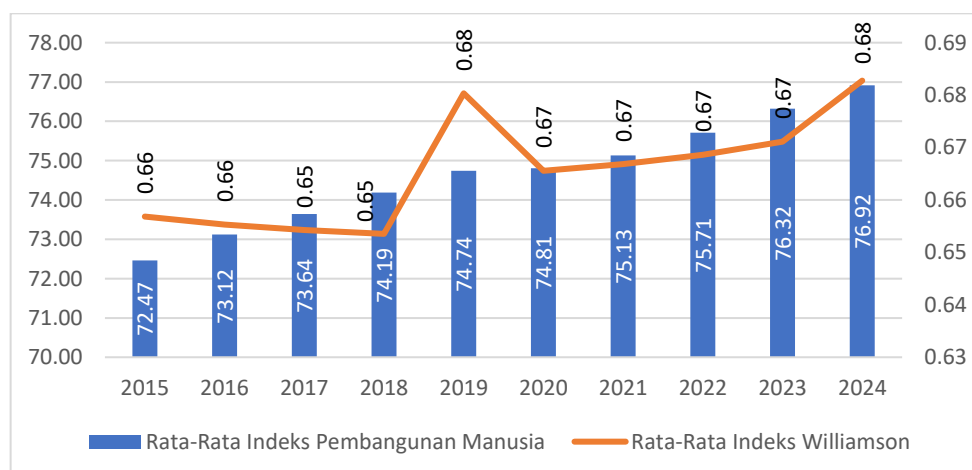
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah 2026

Gambar 1. 5 Rata-rata Investasi dan Indeks Williamson di Pulau Jawa Tahun 2015-2024 (juta rupiah)

Berdasarkan gambar 1.5 rata-rata investasi pada 6 provinsi di Pulau Jawa menunjukkan tren yang cenderung meningkat selama periode 2015-2024, yaitu dari Rp 49.445.04 juta pada tahun 2015 menjadi Rp 136.462.711 juta pada tahun 2024. Peningkatan investasi tersebut menunjukkan semakin besarnya aliran modal yang masuk ke wilayah Pulau Jawa. Namun, rata-rata indeks williamson

cenderung mengalami fluktuasi, yang menunjukkan bahwa peningkatan investasi belum sepenuhnya mampu menurunkan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Oleh karena itu, investasi dipilih sebagai salah satu variabel penelitian karena memiliki peran penting dalam memengaruhi dinamika ketimpangan pembangunan antarwilayah di Pulau Jawa.

Pembangunan ekonomi tidak semata-mata berorientasi pada penciptaan aset fisik, namun juga berfokus pada upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Perbaikan kualitas manusia memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja ekonomi suatu wilayah. Dengan demikian, pembangunan manusia yang lebih tinggi berkontribusi dalam menekan ketimpangan pembangunan, karena peningkatan kemampuan, keterampilan, dan kapabilitas masyarakat akan mendorong produktivitas serta pemerataan hasil pembangunan. Salah satu aspek krusial yang mencerminkan kualitas capaian pembangunan ekonomi adalah tingkat perkembangan manusia, yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Dewi *et al.*, 2021). Berikut rata-rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pulau Jawa.



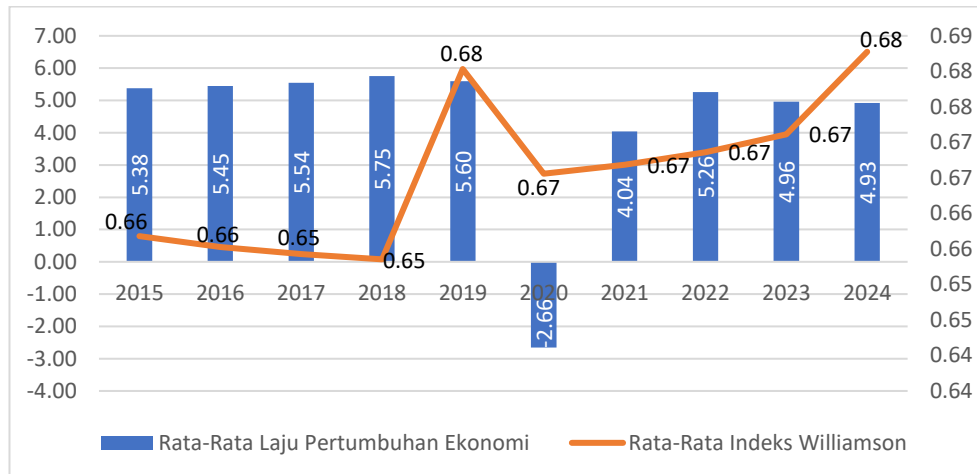
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah 2026

Gambar 1. 6 Rata-rata Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Williamson 6 provinsi di Pulau Jawa Tahun 2015-2024 (indeks)

Berdasarkan gambar 1.6 menunjukkan capaian IPM dari 6 provinsi di Pulau Jawa beserta rata-rata nilai Indeks Williamson di wilayah tersebut. Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata IPM 6 provinsi di Pulau Jawa cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, yang mengindikasikan adanya perbaikan kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat. Namun, rata-rata indeks tidak menunjukkan kecenderungan yang sama karena masih mengalami fluktuasi dan berada pada tingkat ketimpangan yang relatif tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari kenaikan IPM belum sepenuhnya diikuti oleh penurunan ketimpangan pembangunan wilayah di Pulau Jawa. Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa hubungan antara IPM dan ketimpangan pembangunan wilayah masih perlu dikaji lebih lanjut, sehingga IPM dipilih sebagai salah satu variabel yang diduga memengaruhi ketimpangan pembangunan wilayah di Pulau Jawa.

Selain faktor-faktor struktural seperti perbedaan sumber daya alam, kualitas sumber daya manusia, dan distribusi investasi, laju pertumbuhan ekonomi juga merupakan faktor penting yang memengaruhi ketimpangan pembangunan wilayah. Pertumbuhan ekonomi dapat mencerminkan kemampuan suatu wilayah dalam meningkatkan output dan pendapatan masyarakatnya. Menurut teori neoklasik, pertumbuhan ekonomi dapat memengaruhi tingkat ketimpangan pembangunan antarwilayah. Pada tahap awal pembangunan, pertumbuhan ekonomi cenderung meningkatkan ketimpangan karena aktivitas ekonomi, modal, dan tenaga kerja lebih terkonsentrasi di wilayah yang telah maju. Namun, seiring dengan pembangunan yang semakin merata, pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat mendorong pemerataan pembangunan sehingga ketimpangan antarwilayah

berangsur menurun (Sjafrizal, 2008). Berikut laju pertumbuhan ekonomi 6 provinsi yang terdapat di Pulau Jawa.



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah 2026

Gambar 1. 7 Rata-rata Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Williamson 6 provinsi di Pulau Jawa Tahun 2015-2024 (persen)

Berdasarkan gambar 1.7 menunjukkan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi 6 provinsi di Pulau Jawa beserta rata-rata nilai indeks williamson pada periode 2015-2024. Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata laju pertumbuhan ekonomi di enam provinsi di Pulau Jawa mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi cenderung berada pada tingkat yang cukup tinggi sebelum mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2020, kemudian kembali meningkat pada periode berikutnya. Sementara itu, rata-rata Indeks Williamson juga mengalami fluktuasi dan masih berada pada tingkat ketimpangan yang relatif tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Pulau Jawa belum diikuti oleh perubahan tingkat ketimpangan pembangunan wilayah yang konsisten. Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa hubungan antara laju pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan wilayah masih perlu dikaji lebih lanjut. Secara teoritis, apabila laju pertumbuhan ekonomi antarwilayah berlangsung tidak merata, maka manfaat pertumbuhan ekonomi akan terkonsentrasi pada wilayah tertentu sehingga

berpotensi memperlebar kesenjangan pembangunan. Oleh karena itu, laju pertumbuhan ekonomi dipilih sebagai salah satu variabel yang diduga memengaruhi ketimpangan pembangunan wilayah di Pulau Jawa.

Gambaran permasalahan ketimpangan pembangunan di atas menjadikan penelitian ini penting dan layak dilakukan karena Pulau Jawa masih menunjukkan indeks ketimpangan pembangunan yang sangat tinggi sehingga ketidakseimbangan inilah yang memperlihatkan bahwa proses pembangunan belum berjalan merata. Dalam konteks ini, penelitian untuk mengetahui apa saja faktor yang memengaruhi ketimpangan pembangunan antarwilayah menjadi sangat penting untuk mengenai faktor-faktor yang memengaruhi disparitas pembangunan. Kebaruan (*novelty*) pada penelitian ini yaitu terdapat pada variabel yang jarang digunakan dalam penelitian lain terutama di wilayah Pulau Jawa yaitu dengan menggabungkan variabel, Kandungan Sumber Daya Alam, Kondisi Demografis, Investasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Laju Pertumbuhan Ekonomi.

1.2 Rumusan Masalah

Konsentrasi pembangunan yang tidak merata di Pulau Jawa tersebut menimbulkan tantangan bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Daerah tertinggal menjadi semakin sulit mengejar ketertinggalannya karena keterbatasan investasi, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan minimnya dukungan infrastruktur dasar. Kondisi ini memperkuat gap pembangunan antarwilayah dan dapat memperlambat pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang di Jawa Timur. Berdasarkan data dan penjelasan pada latar belakang maka berikut adalah beberapa pertanyaan pada penelitian ini:

1. Apakah kandungan Sumber Daya Alam (SDA) memengaruhi tingkat ketimpangan pembangunan wilayah di Pulau Jawa selama periode 2015-2024?
2. Apakah kandungan kondisi demografis memengaruhi tingkat ketimpangan pembangunan wilayah di Pulau Jawa selama periode 2015-2024?
3. Apakah kandungan investasi memengaruhi tingkat ketimpangan pembangunan wilayah di Pulau Jawa selama periode 2015-2024?
4. Apakah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memengaruhi tingkat ketimpangan pembangunan wilayah di Pulau Jawa selama periode 2015-2024?
5. Apakah laju pertumbuhan ekonomi memengaruhi tingkat ketimpangan pembangunan antarwilayah di Pulau Jawa selama periode 2015-2024?
6. Apakah variabel Kandungan Sumber Daya Alam (SDA), Kondisi Demografis, Investasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Laju Pertumbuhan Ekonomi memengaruhi tingkat ketimpangan pembangunan antarwilayah di Pulau Jawa pada selama periode 2015-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berikut merupakan tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis pengaruh kandungan Sumber Daya Alam (SDA) terhadap tingkat ketimpangan pembangunan wilayah di Pulau Jawa selama periode 2015-2024
2. Menganalisis pengaruh kondisi demografis terhadap tingkat ketimpangan pembangunan wilayah di Pulau Jawa selama periode 2015-2024
3. Menganalisis pengaruh investasi terhadap tingkat ketimpangan pembangunan wilayah di Pulau Jawa selama periode 2015-2024

4. Menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat ketimpangan pembangunan wilayah di Pulau Jawa selama periode 2015-2024
5. Menganalisis pengaruh laju pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat ketimpangan pembangunan wilayah di Pulau Jawa selama periode 2015-2024
6. Menganalisis pengaruh kandungan Sumber Daya Alam (SDA), Kondisi Demografis, Realisasi Investasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap tingkat ketimpangan pembangunan wilayah di Pulau Jawa selama periode 2015-2024

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis dengan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi ketimpangan pembangunan di Pulau Jawa, penelitian ini tidak semata-mata bertujuan menambah wawasan ilmiah tetapi juga diharapkan mampu memberikan masukan yang relevan bagi perumusan kebijakan daerah.

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Menambah referensi akademis mengenai faktor-faktor yang memengaruhi ketimpangan pembangunan antarwilayah.
2. Menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya apabila hendak melakukan kajian serupa dengan ruang lingkup atau variabel yang lebih luas.
3. Menyediakan dasar empiris yang dapat digunakan untuk menguji dan mengembangkan teori-teori ekonomi pembangunan serta model analisis ketimpangan wilayah.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini dapat dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih berorientasi pada pemerataan antarwilayah, karena mampu memberikan gambaran mengenai sektor atau wilayah yang membutuhkan intervensi prioritas untuk mengurangi ketimpangan. Temuan penelitian ini juga berperan penting sebagai bahan evaluasi bagi perencanaan strategis daerah, serta berbagai program pengembangan wilayah, sehingga proses perencanaan menjadi lebih responsif terhadap kondisi ketimpangan aktual di lapangan.
2. Bagi Lembaga Pendidikan, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik dalam bidang perencanaan pembangunan dan ekonomi regional, menjadi bahan ajar serta studi kasus, dan menyediakan data empiris untuk penelitian lanjutan. Penelitian ini juga memperkuat peran institusi pendidikan sebagai pusat kajian yang berkontribusi dalam pemecahan masalah pembangunan dan pengembangan kebijakan publik.